

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penanaman Modal Asing dengan skema PPP merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur fisik dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur di wilayah Republik Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama atau Pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.

Bentuk penanaman modal asing dengan skema PPP ini merupakan suatu bentuk penyertaan modal asing (skema kemitraan/kerjasama) dengan modal dalam negeri bersumber dari APBN (pemerintah) sedangkan bentuk kerjasama dalam sistem penanaman modal ini dapat berupa *Build-Own-Transfer* (BOT) dan berbagai variasi bentuk lainnya dengan tema sama. *Build-Own-Transfer* (BOT) merupakan kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak.

Berbagai kelebihan praktis tersedia dari pengimplementasian sistem penanaman modal asing dengan skema PPP ini sedangkan kekurangan dari sistem penanaman modal dengan skema PPP ini adalah pembangunan proyek infrastruktur yang tidak efisien dalam segi waktu karena akan memakan waktu yang cukup lama padahal telah terbentuk komite khusus yang menangani hal tersebut yaitu Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur namun pembangunan proyek infrastruktur-infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek infrastruktur dengan skema PPP berjalan lambat. Hal itu disebabkan kurangnya fokus pemerintah dalam pengembangan proyek infrastruktur skema PPP saat ini.

## **B. Saran**

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011, sebaiknya dengan adanya Komite ini pemerintah dapat benar-benar meningkatkan kinerja dengan fokus mengembangkan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dibangun dengan skema PPP tidak hanya pada investor asing terdekat namun dapat dipromosikan kepada badan usaha swasta pada negara-negara yang berprospek tinggi yang kira-kira akan tertarik untuk berinvestasi di bidang Infrastruktur seperti: Amerika, Jerman, Belanda, Denmark, dll bahkan tidak menutup kemungkinan pada badan usaha besar yang terdapat di dalam negeri sehingga proses penanaman modal asing dengan skema PPP ini nantinya dapat berlangsung cepat, tepat, dan bermanfaat.